

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar)**

**MUHAMMAD AKRAM
105730445313**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar)**

**MUHAMMAD AKRAM
105730445313**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2017**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS
EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 250 Makassar • Fax (0411) 860 132 Makassar 90271 • www. Ump-muhammadiyah

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja
Pejabat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Kota
Makassar)
Nama : Muhammad Akram
Nim : 10573 04453 13
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan Bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan panitia penguji
Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Minggu 16 Juli 2017 pada Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Juli 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muchran BL, MS

Murtiarni, SE, M.Si

NBM: 602 783

NBM: 117 227 3

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ismail Rasuloni, SE, MM

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA

NBM: 003 078

NBM: 107 342 8



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS
EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar telp/Fax (0411) 860 132 Makassar 90231 www. Umu-makassar.info

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Muhammad Akram, Nim 10530445313 ini Telah Diperiksa dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 125 Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Minggu, 16 Juli 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 22 Syawal 1438 H

16 Juli 2017 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM 
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi) (.....)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM 
(Wakil Dek. 1 Fak. Ekonomi) (.....)
4. Penguji
 - a. Dr. Agusfalim HR, SE., MM 
 - b. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,Ak.CA 
 - c. Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.CA 
 - d. Samsul Rizal, SE.,MM 



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS
EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Akram

NIM : 10573 04453 13

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan Dosen Pembimbing masing-masing :

1. Dr. H. Muchran BL, MS
2. Muttiarni, SE, M.Si

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk di pergunakan sebagai mestinya. Akhir kata kuucapkan terimah kasih.

Makassar, 16 juli 2017

Yang menyatakan,

Muhammad Akram

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S Al Baqarah ayat 153)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dengan suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al Insyrah ayat 6-8)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

(Imam Ali bin Abi Thalib as.)

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada

Rabbi & Panutanku

Allah SWT Nabi Muhammmad SAw

Ridhai dan rahmati segala usaha hambamu ini

Ayahanda dan Ibundaku

Lereng dan Coma’

Terima kasih atas segenap cinta, doa, pengorbanan, dan perjuangan untuk ananda

Almamaterku...

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar)”**

Dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan do'a yang tulus serta memberikan bantuan baik moral maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdullah Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Ismail Rasulong, SE, MM.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, Ismail Badollahing, SE, M.Si, Ak.CA.
4. Dr. H. Muchran BL, SE, MS, dan Muttiarni, SE, M.Si, selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing, memberi saran, kritikan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Jurusan Akuntansi yang telah memberi ilmu pengetahuan yang berharga dan bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
7. Sekretaris DPDR kota Makassar yang telah memberikan ijin penelitian serta banyak memberikan bantuannya.
8. Seluruh SKPD kota Makassar yang telah menerima dan memudahkan saya dalam memperoleh data sehingga penelitian berjalan lancar. Terima kasih atas suportnya yang di telah di berikan kepada saya sehingga skripsi selesai.
9. Kedua orang tuaku “Lereng dang Coma” yang senantiasa memanjatkan do’a, dukungan dan kasih sayang sehingga Ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga, saudara dan kerabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis: Muhammad Asrullah, Suhendra, Kalbu, Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan segala keluh kesah, curahan hati, air mata, menjadi sandaran, terus memberikan semangat dan dukungan tiada henti, serta sweet escape a simple happiness di saat penulis jenuh mengerjakan skripsi.

12. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi : Nur Afmy, Sri, Hasna, Ika, Devy, Ridwan, Ifro, Hasna Nurdin. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan sharing selama bimbingan skripsi.
13. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2013 terkhusus jurusan akuntansi kelas sembilan (IX) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan indah yang kalian berikan, moment tak terlupakan dari awal kuliah hingga selesai kuliah ini. See you on top, guys.
14. Kak Chia selaku sfat prodi jurusan akuntansi yang selalu memberikan infomasi pada penulis dalam hal perkuliahan semester akhir. Makasi suportnya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, dukungan, semangat dan bantuannya baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak atau pembaca yang sifatnya membangun agar laporan ini dapat lebih baik dan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRAK</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Anggaran.....	9
2. Mekanisme Penyusunan APBD	13
3. Penyusunan APBD.....	17

4. Karakteristik Tujuan Anggaran.....	21
1). Partisipasi	22
2). Kejelasan Tujuan Anggaran.....	24
3). Umpan Balik Anggaran	25
4). Evaluasi Anggaran	26
5). Kinerja Pejabat Pemerinta Daerah	27
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	37
D. Hepotesis.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Data.....	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Populasi dan Sampel Penelitian	39
E. Definisi Operasional Variabel	40
1. Partisipasi Anggaran (X1).....	41
2. Kejelasan Tujuan Anggaran (X2)	41
3. Umpan Balik Anggaran (X3).....	41
4. Evaluasi Anggaran (X4)	42
5. Kinerja Pejabat Pemerinta Daerah (Y).....	42
F. Metode Analisis Data.....	43
1. Uji Kualitas Data.....	43
1). Uji Validitas	43

2). Uji Relialiditas	43
2. Uji Asumsi Klasik.....	44
1). Uji Normalitas.....	44
2). Uji Autokorelasi.....	45
3). Uji Heterokedastisitas	46
4). Uji Multikolinearitas	46
5). Pengujian Hipotesis	47

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	49
1. Dinas Pendapatan Daerah	49
2. Dinas Pekerjaan Umum	50
3. Dinas Penataan Ruang	51
4. Dinas Kesehatan.....	52
5. Dinas Pendidikan	53
6. Dinas Perhubungan	53
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54
8. Dinas Perikanan dan Pertanian	55
9. Dinas Lingkungan Hidup.....	56
10. Sekretariat DPRD.....	56

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Responden	58
B. Statistik Deskriptif Responden.....	60
C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	62

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Partisipasi Anggaran (X1).....	62
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kejelasan tujuan Anggaran (X2)	63
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Umpan Balik Anggaran (X3).....	64
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Evaluasi Anggaran (X4).....	66
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja Pejabat Pemda (Y)	67
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	69
1. Hasil Uji Normalitas	69
2. Hasil Uji Autokorelasi	71
3. Hasil Uji Heterokedastisitas	72
4. Hasil Uji Multikolinearitas.....	74
5. Hasil Pengujian Hipotesis	75
a. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	75
b. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)	77
c. Hasil Penelitian dan Pembahasan	78
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian	40
Tabel IV.1 Sampel Kepala Dinas dan Kepala Bidang	58
Tabel IV.2 Tingkat Pengumpulan Kuisisioner	59
Tabel IV.3 Demografi Responden	60
Tabel IV.4 Statistik Deskriptif Responden	61
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Partisipasi Anggaran	62
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kejelasan Tujuan Anggaran	64
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Umpan Balik Anggaran	65
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Evaluasi Anggaran	66
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja Pejabat Pemda	68
Tabel IV.10 Hasil Uji Normalitas (K-S-Z Test)	71
Tabel IV.11 Hasil Uji Autokorelasi	72
Tabel IV.12 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)	74
Tabel IV.13 Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel IV.14 Hasil Pengujian Hipotesis	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1 Kerangka Pikir.....	37
Gambar IV. 1 Uji Normalitas.....	70
Gambar IV. 2 Diagram Scatterplot Heterokedastisitas	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 4 Tempat Penelitian.....	
Lampiran 5 Hasil Olahan Data	
Lampiran 6 Tabel Durbin_Watson	
Lampiran 7 Tabel r (Koefisien Korelasi Sederhana)	

ABSTRAK

MUHAMMAD AKRAM. 2017. Influence Characteristics of Budget Objectives on Performance of Local Government Officials (Study of Makassar City Government). Guided by H. Muchran BL. and Muttiarni.

The purpose of this study is to examine the influence of Characteristics of Budget Objectives on Performance of Local Government Officials in Makassar City. Sampling technique in this research using purposive sampling.

This method was chosen because the sample was chosen based on the criteria of Local Government Officials who held positions at the lower and middle level as well as committed official means officials who have activities in budgeting and simultaneously as budget executives and staff handling in the preparation of the budget. Samples are processed in this study as many as 50 samples and processed using SPSS program to test the hypothesis.

This study found that from five variable Characteristic of Budgetary Objectives, three variables (participation, clarity of purpose, feedback) significantly influence Performance of Local Government Officials in Makassar City, while variable budget evaluation is not significant to Performance of Local Government Officials in Makassar City.

Keywords: Characteristic of Budget Objectives towards Performance of Regional Government Officials.

ABSTRAK

MUHAMMAD AKRAM. 2017. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah (Studi Pemerintahan Kota Makassar). Dibimbing oleh H. Muchran BL. dan Muttiarni.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah di Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling.

Metode ini dipilih karena sampel dipilih berdasarkan kriteria yaitu Pejabat Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan pada level menengah ke bawah yang sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen artinya pejabat yang mempunyai kegiatan dalam penganggaran dan sekaligus sebagai pelaksana anggaran dan staf yang menangani dalam penyusunan anggaran. Sampel yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel dan diolah menggunakan program SPSS untuk menguji hipotesis.

Penelitian ini menemukan bahwa dari lima variabel Karakteristik Tujuan Anggaran, tiga variabel (partisipasi, kejelasan tujuan, umpan balik) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah di Kota Makassar, sedang variabel evaluasi anggaran tidak signifikan terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah di Kota Makassar.

Kata Kunci : Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah dan Hubungan Keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005)

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masing-masing daerah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut demi kemajuan daerahnya, pemerintah pusat tidak bisa secara langsung campur tangan dalam setiap aktivitas yang dilakukan daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai mediator dan penengah, serta pemberi petunjuk atas hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pemda, termasuk juga dalam hal penyusunan.

Penyusunan anggaran publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor privat. Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang public.

Perubahan-perubahan atas rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya lazim dilakukan. Praktik yang berlaku adalah Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan. Anggaran murni adalah anggaran awal seperti terdapat dalam RAPBD. Anggaran Perubahan adalah anggaran yang ditetapkan setelah RAPBD berjalan. Selisih besaran antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan ini menjadi perhatian utama.

Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi sektor publik yang menjalankan otonomi daerah sesuai aturan dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Kondisi ini memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik, maka dibutuhkan adanya kinerja manajerial yang baik di dalam pemerintahan tersebut.

Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, mengingat pentingnya fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam organisasi maka proses penyusunan,

pelaksanaan dan evaluasi anggaran perlu dilakukan agar dapat disesuaikan dengan tujuan anggaran.

Anggaran bukan hanya menjadi sebuah rencana keuangan yang dikelompokkan dalam tujuan, biaya dan pendapatan untuk pusat pertanggung jawaban suatu organisasi, tapi juga sebagai alat untuk pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kerja, serta motivasi. Pengetahuan tentang tujuan yang dianggarkan dan informasi mengenai sejauh mana tujuan yang diterima memberikan dasar kepada atasan dalam pengukuran efisiensi, pengidentifikasian masalah, dan pengendalian biaya. Seluruh aspek ini menunjukkan bahwa anggaran memiliki potensi untuk menyajikan saran yang berguna bagi kepentingan manajerial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun harus pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Mengingat pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kota harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2016 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2016, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2016 dan RKPD provinsi Tahun 2016. Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjarangan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjarangan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah.

Agar pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, penyusunan anggaran dan penerapannya harus memperhatikan 5 komponen karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi penyusunan anggaran (*budgetary participation*), kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*) dan kesulitan sasaran anggaran (*budget goal difficulty*). Adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya, target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai organisasi sehingga dapat memberikan suatu tingkat kepuasan. Alasan peneliti untuk menganalisis Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar karena :

1. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan.
2. Aparat pemerintah Daerah di SKPD yang dijadikan responden dalam penelitian ini merupakan subjek langsung penganggaran yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab anggaran untuk program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk penjabaran dari rencana strategis SKPD, sehingga responden berkaitan langsung atas permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menguji kembali

“PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintahan Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah ?
2. Apakah Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah ?
3. Apakah Umpan Balik Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah ?
4. Apakah Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh Umpan Balik Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP) khususnya pengembangan sistem pengendalian manajemen pada sektor publik.
2. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan Kinerja Pejabat Pemerintah untuk mencapai tujuan anggaran yang diinginkan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematik sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti anggaran, mekanisme penyusunan APBD, karakteristik tujuan anggaran dan indikator penilain kinerja serta tinjauan penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan data yang digunakan dalam bentuk metodologi pelitian yang meliputi jenis dan sumber data, medote pengumpulan data, populasi dan sampel, dan definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian serta pembahasan dari data yang telah diolah yang terdiri dari hasil pengumpula data, demograsi responden, pengukuran variabel, metode pengujian kualitas data dan pengujian hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, berikut batasan-batasan yang ditentukan serta saran-saran utuk perbaikan peneliti yang datang dengan judul yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Arah kebijakan umum APBD disusun setelah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan Dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedang penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran. Anggaran sektor publik menyajikan suatu bagian yang penting dari sistem motivasi organisasi yang dirancang untuk memperbaiki perilaku dan kinerja aparat pemerintah.

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur yang lain, mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana jangka

pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan.

Menurut Bastian (2006), anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan definisi anggaran diatas, dapat diartikan anggaran sebagai suatu perencanaan yang disusun untuk periode waktu tertentu yang akan direalisasikan dalam jangka waktu kedepan, dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah disusun. Dalam sistem keuangan daerah, peran penting APBD dapat dilihat dari fungsi utamanya sebagai berikut :

1. Sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk:
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
 - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan institusi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.

- c. Mengalokasikan sumber sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Sebagai alat pengendalian, yang antara lain digunakan untuk:
 - a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran.
 - b. Membatasai kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah.
 - c. Mencegah overspending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang yang bukan prioritas.
 - d. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
3. Sebagai alat kebijakan fiskal, yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi daerah dan mendorong ekonomi daerah melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Sebagai alat politik, yang digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas atau bahkan menjatuhkan kepemimpinan eksekutif.
5. Sebagai alat komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran

yang disusun dengan baik akan dapat mendeteksi adanya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan anggaran.

6. Sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Kinerja setiap pelaksanaan dapat diukur dan dievaluasi secara periodik yaitu:
 - a. Telah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran.
 - b. Tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
 - c. Telah dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan pembading.
7. Sebagai alat untuk memotivasi manajemen pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya memberikan tantangan tertentu namun tetap ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai.
8. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Artinya, proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat, melalui proses penjaringan aspirasi yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan umum anggaran.

Tahapan penganggaran organisasi Pemerintah Daerah merupakan tahapan yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Arti penting APBD dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya dan pilihan yang tersedia terbatas.

2. Mekanisme Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016 masih tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran (output) dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang dipresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Dengan kata lain ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam mengambil keputusan yang mengarah pada penentu tujuan operasional dan penetapan sasaran kerja. Dalam sistem keuangan daerah, peran penting APBD dapat dilihat dari fungsi utamanya. Anggaran memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

1. Sebagai Alat Perencanaan. Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternative sumber pembiayaan.
2. Alat Pengendalian Anggaran digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran pemerintah sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Alat Kebijakan Fiskal Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Alat Politik Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dan publik.
5. Alat Koordinasi Dan Komunikasi Penyusun anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat.
6. Alat Penilaian Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Alat Motivasi Anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai atau menuntut tetapi dapat diwujudkan sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai proses organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut (Indra Bastian, 2005) menjelaskan bahwa fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak baru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan sebagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian imit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrumen politik

Berdasarkan definisi fungsi diatas, dapat ditarik prinsip anggaran dalam penyusunan APBD sebagai suatu perencanaan yang disusun untuk periode waktu tertentu yaitu:

1. Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (dipemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu

proises yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.

2. Adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimtmi bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
3. Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi oleh masyarakat umum.
4. Bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa raengacu pada etika dan moral yang tinggi.
5. Berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara.
6. Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstem kepada rakyat

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut adalah dana desentralisasi. Dana dekonsentrasi terbentuk dan bagi hasil, dan umum, dan dana alokasi khusus.

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016 masih tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran (output) dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang dipresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai proses organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Pada pemerintah daerah, anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui

usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Dalam penyusunan anggaran tahunan, mekanisme dan proses penyiangan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dengan meningkatnya partisipasi, maka bawahan merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan semangat dan keagairahan kerja serta rasa tanggung jawab.

Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumberdaya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke panitia eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draf Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak legislatif .

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016, dalam menyusun APBD tahun anggaran 2017 ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu (*unifilied budget*) dimana dalam menyusun rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan

kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu, harus tetap sejalan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dalam siklus penganggaran ditetapkan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

1. Tahap persiapan anggaran.

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Artinya perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap ratifikasi.

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Selain keahlian di atas, pimpinan eksekutif harus mempunyai integritas dan kesiapan mental yang tinggi. Hal ini menjadi penting karena pada tahap ini dibutuhkan pimpinan eksekutif yang mampu menjawab dan memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran.

Tahap ini yang paling penting adalah harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik, bagaimana sistem informasi keuangan termasuk sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi.

Tahap ini sangat terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi/pelaksanaan anggaran didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap ini diharapkan tidak banyak masalah.

Dalam rangka menyusun APBD, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) oleh Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- b. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah.
- c. Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai PPAS antara
- d. Pemerintah daerah dengan DPRD.
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD.
- f. Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

Selanjutnya menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu:

1. Eksekutif
 - a. Kabinet
 - b. Eksekutif
 - c. Departemen-departemen pemerintah
 - d. Departemen keuangan
 - e. Unit kerja pemerintah yang memberikann dana.

2. Legeslatif

- a. DPR ditingkat pusat
- b. Komisi-komisi di DPR
- c. DPRD

3. Auditor

Dengan Memandang APBD sebagai proses manajemen pemerintah maka proses penyusunan APBD dianggap sebagai proses administrasi pemerintah. Birokrasi pemerintahan juga beroperasi sebagaimana organisasi perusahaan dimana setiap elemen sosial dan kenegaraan dikontrol dan diarahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

4. Karakteristik Tujuan Anggaran

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD' 45. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan.

Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006: 188).

Dalam kajian teoritis sebagai dasar untuk penelitian ini masih banyak menggunakan kajian teoritis pada sektor privat yang berhubungan dengan variabel variabel yang diteliti. Hal ini dikarenakan variabel-variabel yang diteliti juga masih menggunakan variabel yang diteliti pada sektor privat. Namun tidak mengurangi kajian kajian teoritis yang berhubungan dengan sektor publik sebagai dasar/acuan dalam penelitian pada sektor publik. Karakteristik Tujuan Anggaran (budgetary Goal Characteristics) 5 macam yaitu:

1). Partisipasi Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat efektivitas organisa. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional

terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi pejabat pemerintah daerah.

Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi senjangan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi anggaran dari para manajer akan dapat meningkatkan senjangan anggaran. Keterlibatan kerja juga diyakini dapat mempengaruhi senjangan anggaran perusahaan di mana semakin tinggi keterlibatan kerja manajer akan semakin menimbulkan besarnya kesempatan bagi para manajer untuk menimbulkan senjangan anggaran.

Munawar (2006) menemukan mekanisme input partisipasi warga negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input warga negara ke dalam operasional kota bisa membantu dewandalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka panjang.

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dianggap sebagian orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi dari para anggota organisasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legislatif saling beradu argumen dalam pembahasan RAPBD. Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal

ini Kepala Daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan setelah itu Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran.

2). Kejelasan Tujuan Anggaran

Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjarangan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif.

Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draft Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak Legislatif (Kepmendagri No 52 Tahun 2016).

Karena begitu luasnya kejelasan tujuan anggaran, maka tujuan anggaran harus dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dimengerti oleh siapa saja yang

bertanggung jawab. Kejelasan tujuan anggaran berhubungan dengan sejauh mana tujuan-tujuan anggaran dinyatakan secara khusus dan jelas serta di-pahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab memenuhinya. Adapun tujuan penyusunan anggaran sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordnasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.

Munawar (2006) menemukan bahwa aparat pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk mengetahui kejelasan tujuan anggaran yang telah dibuatnya dan mereka merasa puas atas anggaran yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat

3). Umpan Balik Anggaran

Hapsari (2010) menyatakan bahwa umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya untuk mencapai sasaran, maka ia tidak mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan, dan tidak ada insentif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi tidak puas.

Umpan balik merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan. Umpan balik juga dapat mendorong motivasi pelaksanaan anggaran berikutnya, umpan balik anggaran dapat menunjukkan sejauh mana sasaran anggaran telah dicapai.

Rasuli dan Darlis (2015) menyatakan umpan balik memiliki dua fungsi bagi orang-orang yang menerimanya yang pertama berkaitan dengan instruksi dan kedua adalah berkaitan dengan motivasi.

Dengan adanya umpan balik yang diperoleh dari pencapaian sasaran anggaran dan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan maka aparat pemerintah termotivasi dalam meningkatkan kinerja untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran.

4). Evaluasi Anggaran

Menurut PP No. 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja yang mendukung

pencapaian tujuan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik

Menurut Kamaliah Darlis (2010) evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Evaluasi anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi.

Evaluasi secara mendasar mempunyai 4 tujuan yaitu meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan, memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya, sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi dan untuk menilai pembuatan keputusan manajemen. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan kinerja manajer.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik.

5). Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;382) adalah pencapaian dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja merupakan prestasi kerja atau

performance, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan. sebagai kinerja, hasil kerja/prestasi kerja dan kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung.

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan bagaimana cara mengerjakannya dan mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, prestasi yang dilihat dan kemampuan kinerja.

Menurut Aulia Apriani (2009), kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan Kinerja dalam mewujudkan saran, tujuan, visi, dan misi, pada pemerintah daerah. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam waktu periode tertentu.

Kinerja Aparat Pemerintah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan.

Kinerja Pejabat Pemerintah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment sistem.

Kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan, partisipasi umumnya dinilai sebagai suatu pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi.

Putu, L (2014) menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan, partisipasi umumnya dinilai sebagai suatu pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi.

Suatu kinerja merupakan suatu istilah yang secara umum digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu atau yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas suatu manajemen.

Menurut Rasuli, M, (2015) kinerja sendiri mengacu pada kadar pencapaian tugas yang membentuk sebuah pekerjaan. Kinerja merefleksikan seberapa karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Akan tetapi, sering disalahtafsirkan sebagai upaya yang menceminkan energi yang dikeluarkan, dimana kinerja diukur dari segi hasil.

Dalam pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan anggaran perlu adanya perbandingan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran akuntabilitas pemerintah.

Namun, yang tidak kalah penting harus diperhatikan adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis dengan menggunakan input yang berasal dari publik. Sehingga, perlu dilakukan akomodasi atas input tersebut agar tidak mengundang kritikan dari public.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai sekelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada pada badan atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan.

1. Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2005) Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*). Kinerja dapat dinilai dengan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) yaitu: tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
- b. Keluran (*output*) yaitu: tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau program masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*), yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- d. Manfaat (*benefit*) yaitu: tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
- e. Dampak (*impact*) yaitu: tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Menurut bastian (2005) Syarat indikator kinerja yang baik yaitu:

- a. Spesifik, jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
- b. Measurable, mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya.
- c. Attributable, indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
- d. Relevan, indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab akibat antar indikator.
- e. Timely, indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan.

2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sistem pengukuran kinerja aparat pemerintah daerah adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi menilai ukur finansial dan non finansial.

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Manfaat dari pengukuran kinerja yaitu:

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- b. Membantu mengambil keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

3. Aspek yang di ukur

Menurut Bastian (2005;276) setiap organisasi tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut:

a. Aspek finansial

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja, sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

b. Kepuasan pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat klusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu jika dikaitkan dengan pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Operasi dan Bisnis

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

d. Kepuasan pegawai

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh nyata.

e. Kepuasan komunitas dan Shareholders/stakeholders

Pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan dari pada stakeholder.

f. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
DAFTAR NAMA PENELITI TERDAHALU

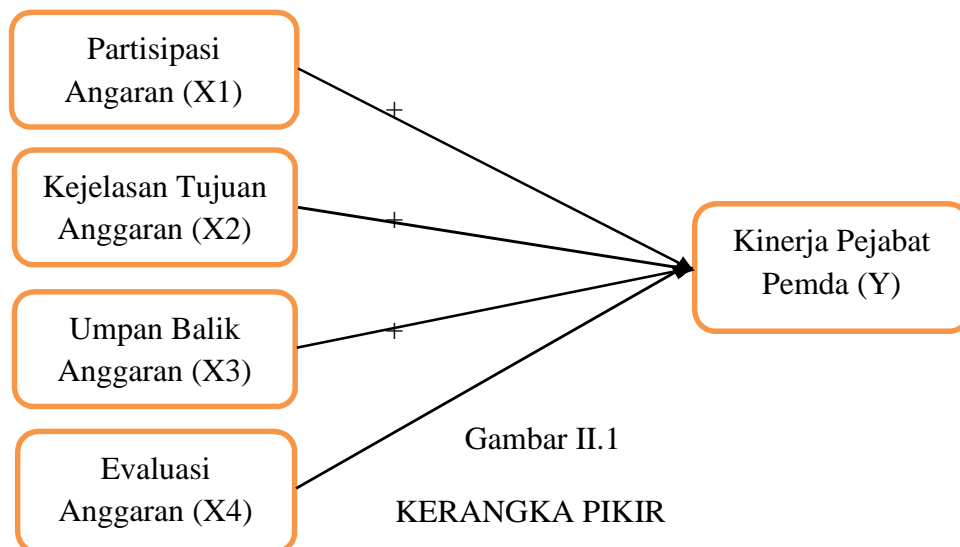
No	NamaPeneliti / Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan / Persamaan dengan Penulis
1.	Aulia Apriani, M. Rasuli & Taufeni Taufik (2009).Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel Intervening.	Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Umpan balik anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja.	Aparat pemerintah daerah yang ada di Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian adalah yang membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
2.	Hapsari, N. (2010) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi dan locus of control sebagai variabel moderating	Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja aparatur pemerintah daerah.	Persamaan : Menggunakan variabel independen yang sama. Perbedaan : Metode penelitian kuantitatif analisis regresi berganda.
3.	Hermining sih SNA, (2009) Pengaruh Partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelolah keuangan daerah terhadap kenerja pemerintah daerah di Kabupaten Demak.	Partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Persamaan : Menggunakan variabel partisipasi dan dan dependen kinerja Pemda.

4.	Kamaliah, Darlis, E. & Virsanita, (2010) Pengaruh Perilaku Oportunistik Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Pegawai Pemerintah Kabupaten /Kota Di Provinsi Riau).	Partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial, pada menajer yang berperilaku oportunistik yang rendah, dan mempunyai pengaruh negatif pada manajer yang berperilaku oportunistik yang tinggi.	Menggunakan variabel independen: partisipasi anggaran, dan satu variabel dependen: kinerja manajerial serta satu variable moderating: perilaku oportunistik.
5.	Munawar.(2006) Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang.	Karakteristik tujuan anggaran yang diwakili dari partisipasi, evaluasi, kejelasan, umpan balik anggaran	Persamaan: menggunakan variabel independen yang sama yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran..
6.	Putu, L., Wirawati, P., Sinarwati, N. K. & Atmadja, A. T (2014) Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli.	Pengawasan Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangli; dan Karakteristik tujuan anggaran.	Persamaan : Menggunakan variabel independen yang sama Perbedaan : -tempat penelitian
7.	Pilipus Ramandei (2009) Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja manajerial Aparatur Pemerintah Daerah.	Lima variable Karakteristik tujuan anggaran (Partisipasi, kejelasan, evaluasi, umpan balik dan kesulitan) dan Sistem pengendalian internal mempengaruhi kinerja aparatur Pemerintahan Daerah baik secara parsial.	Persamaan : Menggunakan variabel independen yang sama. Perbedaan : Hanya menggunakan variabel dependen kinerja
8.	Putu, L., Wirawati, P., Sinarwati, N. K. & Atmadja, A. T (2014) Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli.	Pengawasan Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangli; dan Karakteristik tujuan anggaran.	Persamaan : Menggunakan variabel independen yang sama Perbedaan : tempat penelitian

9.	Rahayu, dkk (2007) Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Jambi.	Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap penyusunan anggaran. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap penyusunan anggaran. Umpan Balik anggaran tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran.	Persamaan: menggunakan variabel independen yang sama yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran.
10.	Rasuli, M., & Darlis, E. (2015) Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin	Motivasi tidak dapat memediasi hubungan umpan balik anggaran dengan kinerja manajerial dan evaluasi anggaran dengan kinerja manajerial. Ini artinya motivasi yang dimiliki oleh pejabat struktural SKPD Kabupaten Merangin tidak mampu dalam meningkatkan kinerja manajerial.	Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Model (SEM) yang berbasis komponen atau varian (variance).
11.	Solina, M (2014) Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kota Tanjung Pinang.	Akuntabilitas publik, Partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran dan Struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Tanjung pinang.	Menggunakan variabel Kinerja Manajerial (Y), Akuntabilitas (X1), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) Kejelasan, Kejelasan Sasaran Anggaran (X3), Struktur Desentralisasi (X4).
12.	Veby Anggi Wulandari (2008) Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Pekanbaru.	Variabel karakteristik tujuan anggaran yang diwakili dari partisipasi anggaran(X1), kejelasan tujuan anggaran(X2), umpan balik anggaran sangat berpengaruh terhadap Aparat Pemerintah Daerah.	Persamaan : Menggunakan variabel independen yang sama Perbedaan : -tempat penelitian

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, yang telah dijelaskan sebelumnya maka disusun tentang kerangka pikir seperti yang didiskripsikan pada gambar II.1 dibawah ini:



Gambar II.1

KERANGKA PIKIR

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pikir maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
2. Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
3. Umpan Balik Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
4. Evaluasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah yang berlokasi di kota Makassar. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 sampai bulan April 2017. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah. Dalam hal ini populasi dan sampel yang digunakan untuk mendukung teknik pengukuran variabel kepuasan.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan mengawasi dan mempelajari secara langsung Pemerintahan Kota Makassar. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data khususnya hal yang berkaitan dengan pengukuran Kinerja Pejabat Pemerintah Kota Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden atas kuisisioner yang diberikan.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Dalam hal ini data sekunder berupa laporan keuangan, dokumen perusahaan.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten di perusahaan daerah.

2. Kuesioner

Yaitu dengan menyebarkan kuesioner untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan karyawan dan pelanggan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer ini dikumpulkan dengan mengantarkan langsung kuesioner kesetiap kantor Dinas yang ada di Kota Makassar untuk di isi lalu diambil kembali dalam waktu yang telah di tentukan dan akan di olah datannya. Selain kuesioner yang akan saya berikan juga nantinya akan dilakukan wawancara yang merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara peneliti dan responden. Data primer ini dikumpulkan data yang yang harus diolah.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Metode ini dipilih karena sampel akan diambil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, dimana target responden adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan pada level menengah kebawah yang sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen, artinya pejabat mempunyai kegiatan dalam penganggaran dan

sekaligus sebagai pelaksana anggaran dan beberapa staf yang menangani dalam penyusunan anggaran di Pemerintah Kota Makassar.

Tabel III.1
POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

No	Nama Dinas	Jumlah Sampel	
		Kep. Dinas	Kep. Bagian
1	Dinas Pendapatan Daerah	1	5
2	Dinas Pekerjaan Umum	1	5
3	Dinas Penataan Ruang	1	5
4	Dinas Kesehatan	1	4
5	Dinas Pendidikan	1	4
6	Dinas Perhubungan	1	4
7	Dinas Penanaman Modal	1	4
8	Dinas Perikanan dan Pertanian	1	4
9	Dinas Lingkungan Hidup	1	4
10	APRD Bagian Anggaran		2
Jumlah		9	41

Sumber: Dinas Pemerintahan Kota Makassar (2017)

E. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel adalah konstruk yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasional terhadap konstruk yaitu upaya mengurangi abstraksi sehingga dapat diukur. Ada 5 variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran. Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah kinerja aparat pemerintah daerah. Berikut penjelasan mengenai definisi operasional variabel masing-masing.

1. Partisipasi Anggaran (X1)

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang di usulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka. Untuk melakukan pengukuran terhadap partisipasi anggaran digunakan kuisisioner yang dinilai dengan skala likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju.

2. Kejelasan Tujuan Anggaran (X2)

Kejelasan anggaran mengacu pada tingkat dimana kejelasan anggaran yang ditetapkan secara spesifik dan jelas, dan yang mudah oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Untuk melakukan pengukuran kejelasan tujuan anggaran digunakan kuisisioner yang dinilai dengan dengan skala likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju.

3. Umpan Balik Anggaran (X3)

Umpan balik anggaran mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran tidak efektif dalam memperbaiki kinerja dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki sikap manajer. Umpan Balik Anggaran merupakan alat ukur sejauh mana individu mengetahui sampai dimana tujuan anggaran program dan kegiatan telah dicapa. Untuk melakukan pengukuran umpan balik anggaran digunakan kuisisioner yang dinilai dengan skala likert. Skala likert pada

umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju.

4. Evaluasi Anggaran (X4)

Evaluasi Anggaran didefinisikan sejauh mana selisih anggaran program dan kegiatan SKPD ditelusur oleh pimpinan ke masing-masing bawahan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.

Evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Untuk melakukan pengukuran evaluasi anggaran digunakan kuisioner yang dinilai dengan skala likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju.

5. Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja merupakan prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja seseorang. Kinerja aparat pemerintah daerah dalam penganggaran dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dicapai dan dapat dikendalikan.

Kinerja aparat pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah kinerja para individu atau kemampuan pimpinan/individu untuk dapat mencapai prestasi kerja yang dicapai oleh unit kerjanya dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pengukuran evaluasi anggaran digunakan kuisioner yang dinilai dengan skala likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju.

F. Metode Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

1). Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df) = $n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel, jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan membandingkan antara nilai t hitung > t tabel, maka berkorelasi positif atau valid.

2). Uji Reliabilitas

Istilah realibilitas disamakan dengan konsisten, stabil atau dapat dipercaya, yang pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memperoleh hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama.

Meskipun demikian reliabilitas alat ukur tidak harus selalu diuji dengan melakukan tes ulang, karena berbagai teknik telah memungkinkan pengujian reliabilitas yang tidak memerlukan lebih dari satu kali pengukuran. Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung Cronbach Alpha masing-masing instrumen. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6

maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini (Indrianti dan Supomo,2002:179).

2. Uji Asumsi Klasik

Berbeda dengan alat analisis lainnya, regresi linear ganda memerlukan uji persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada regresi linear ganda biasa disebut dengan istilah uji asumsi klasik. Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliable, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian jelas, bahwa perlunya dilakukan uji asumsi tersebut dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, untuk melihat tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis dan keajegan.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus statistik, dari regresi berganda. Namun sebelumnya terlebih dahulu akan diuji apakah data yang ada telah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya analisis dengan metode ini. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi.

1). Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual normal atau mendekati normal.

Untuk menguji apakah distribusi residual normal atau kah tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorov-Smirnav Nilai K-S. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu:

Hipotesis Nol (H_0) : data terdistribusi normal (nilainya jauh diatas $\alpha=0,05$)

Hipotesis alternatif (H_A) : data tidak terdistribusi secara normal (nilainya jauh dibawah $0,05$)

2). Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelas muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah regresi hasil pengolahan ada korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam satu variabel. Konsekuensi dari autokorelasi adalah biasanya varian dengan nilai yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya.

Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan pengujian Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

3). Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan yang lain tetap disebut heterokedastisitas, dengan kata lain bila terjadi heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat scatterplot dari hasil pengolahan data dari paket statistik dalam komputer yaitu dengan melihat pola scatterplot, dan Uji Glejser yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2006).

4). Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2007) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Uji multikolinearitas untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel terikatnya menjadi terganggu.

Sebagai ilustrasi adalah model regresi dengan variabel bebas motivasi kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan variabel terikatnya adalah kinerja.

Tolerance mengukur variabilitas variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah nilai $Tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali,2006).

5). Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Model regresi berganda ini akan dapat dicerminkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + 1X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4 + e$$

Keterangan:

X1: Partisipasi anggaran

X2: Kejelasan tujuan anggaran

X3: Umpan balik anggaran

X4: Evaluasi anggaran

Y : Kinerja pejabat pemda

e : Residual yang terstandarisasi (error)

a : Konstanta

: Koefisien regresi

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (analisis regresi berganda) dan secara parsial (Uji t) yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregrasikan kinerja pejabat pemda sebagai variabel dependen dan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran sebagai variabel independen.

b. Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan adalah 95% dengan tingkat signifikan sebesar 5 % ($p \text{ value} < 0,05$). Jika $t \text{ hitung} < t \text{ table}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sebaliknya jika $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti Pvariabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari setiap variable independent terhadap variable dependen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah yang berlokasi di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di beberapa SKPD Kota Makassar. Ada pun SKPD ini telah diatur dalam peraturan daerah kota Makassar nomor 8 tahun 2016. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

A. Lokasi Penelitian

1. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah, Kota Makassar berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo no. 04 Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
- b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum, Kota Makassar berlokasi di jalan urip sumoharjo no. 04 Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas.

3. Dinas Penataan Ruang

Dinas Penataan Ruang, Kota Makassar berlokasi di jalan urip sumoharjo no. 04 Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan, Kota Makassar berlokasi di jalan teduh bersiar no. 01 Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan, Kota Makassar berlokasi di Jalan Hertasning, no. 02 Kassi-kassi, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan, Kota Makassar berlokasi di Jalan Malengkeri no. 18 Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Makassar berlokasi di jalan urip sumoharjo no. 04 Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Dinas Perikanan dan Pertanian

Dinas Perikanan dan Pertanian, Kota Makassar berlokasi di Jalan Baji Minasa no. 12 Tamarunang, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Perikanan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Perikanan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas untuk fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup, Kota Makassar berlokasi di jalan urip sumoharjo no. 04 Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD, Kota Makassar berlokasi di jalan andi pangeran pettarani, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretariat

DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk menguji secara empiris tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kejelasan tujuan anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah di Kota Makassar, hasil penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan.

A. Demografi Responden

Teknik pengumpulan data telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sampel penelitian ini adalah Kepala Dinas dan kepala Bagian, DPRD bagian Anggaran yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yang mana terdapat pada 9 kantor dinas dan 1 kantor DPRD bagian Anggaran di Pemerintahan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini.

Tabel IV.1
SAMPEL KEPALA BAGIAN DAN KEPALA BAGIAN

No	Nama Dinas	Jumlah Sampel	
		Kep. Dinas	Kep. Bagian
1	Dinas Pendapatan Daerah	1	5
2	Dinas Pekerjaan Umum	1	5
3	Dinas Tata Penata Ruang	1	5
4	Dinas Kesehatan	1	4
5	Dinas Pendidikan	1	4
6	Dinas Perhubungan	1	4
7	Dinas Penanaman Modal	1	4
8	Dinas Kelautan, Perikanan	1	4
9	Dinas Lingkungan Hidup	1	4
10	APRD Bagian Anggaran		2
	Jumlah	9	41

Sumber: Dinas Pemerintahan Kota Makassar (2017)

Sementara kuisisioner yang disebarakan secara keseluruhan adalah sebanyak 50 buah kuisisioner. Tingkat pengumpulan kuisisioner dapat dilihat pada table IV.2 dibawah ini.

Tabel IV. 2

TINGKAT PENGUMPULAN KUISISIONER

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah kuisisioner yang di sebarakan	50	100 %
Jumlah kuisisioner yang kembali	45	90 %
Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	5	10 %
Jumlah kuisisioner yang dapat di olah	45	90 %

Sumber : Data Olahan (2017)

Berdasarkan dari table di IV.2 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 50 kuisisioner, kuisisioner yang tidak terkumpul kembali sebanyak 5 atau 10% dikarenakan 1 responden Kepala Dinas dan 4 responden Kepala Bagian dikantor dinas tidak mengembalikan kuesiner dengan waktu yang telah disepakati atau ditentukan bersama untuk mengambil kuesioner kembali, disebabkan para responden tersebut sibuk dan lagi dinas keluar kota.

Sedangkan Kuisisioner yang terkumpul kembali sebanyak 45 buah atau 90%. Jadi total kuisisioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuisisioner yang disebarakan adalah 45 buah atau 90 %.

Sedangkan data demografi responden berdasarkan masa kerja, pendidikan terakhir, umur dan jenis kelamin terlihat pada table IV.3 di bawah ini.

Tabel IV. 3
DEMOGRAFI RESPONDEN

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki – laki	26	57,8 %
Perempuan	19	42,2 %
Nama Jabatan		
Kepala Dinas	8	17,8 %
Kepala Bagian	35	77,8 %
DPRD	2	4,4 %
Pendidikan		
SMA	0	0 %
Deplomat	8	17,8 %
S1	26	57,8 %
S2	7	15,6 %
S3	4	8,9 %
Masa Kerja		
5 – 10 Tahun	2	4,4 %
11 – 15 Tahun	10	22,2 %
16 – 20 Tahun	21	46,7 %
21 – 25 Tahun	7	15,6 %
Diatas 25 Tahun	5	11,1 %
Umur		
20 – 25 Tahun	0	0 %
26 – 30 Tahun	9	20 %
31 – 35 Tahun	17	37,8 %
35 – 40 Tahun	13	28,9 %
Diatas 40 Tahun	6	13,3 %

Sumber : Data Olahan (2017)

B. Statistik Deskriptif Responden

Analisa data dilakukan terhadap 45 sampel responden yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data statistis deskriptif ditunjukkan pada tabel IV.4 di bawah ini.

Tabel IV.4
STATISTIK DESKRIPTIF RESPONDEN

Karakteristik	Tujuan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Anggaran						
Partisipasi Anggaran		45	23	40	30,622	5,08692
Kejelasan Tujuan Anggaran		45	16	20	18,0444	1,29607
Umpan Balik Anggaran		45	19	35	25,7333	4,93779
Evaluasi Anggaran		45	19	35	26,6000	3,93354
Kinerja Pejabat Pemda		45	37	60	47,7111	6,80114

Sumber : Data Olahan (2017)

Dalam tabel IV.4 terlihat bahwa variabel partisipasi mempunyai nilai minimum 23 dan nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata sebesar 30,622 dengan standar deviasi 5,08692. Jika jawaban rata rata responden lebih tinggi dari 5,08692 maka hubungan variabel penelitian partisipasi penyusunan cenderung tinggi.

Variabel tujuan kejelasan anggaran mempunyai nilai minimum 16 dan nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata sebesar 18,0444 dengan standar deviasi 1,29607. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 1,46405 maka kejelasan tujuan anggaran cenderung tinggi.

Variabel umpan balik mempunyai nilai minimum 19 dan nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata sebesar 25,7333 dengan standar deviasi 4,93779. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 4,93779 maka umpan balik cenderung tinggi.

Variabel evaluasi mempunyai nilai minimum 19 dan nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata sebesar 26,600 dengan standar deviasi 3,93354. Jika jawaban rata rata responden lebih tinggi dari 3,93354 maka evaluasi cenderung tinggi.

Variabel kinerja aparat pemda mempunyai nilai minimum sebesar 37 nilai maksimum sebesar 60 dan nilai rata-rata sebesar 47,7111 dengan standar deviasi

6,80114. Jika jawaban responden lebih tinggi dari 6,80114 maka variabel kinerja pejabat pemda cenderung tinggi.

C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum data yang terkumpul dianalisis perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini akan menentukan layak data untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid dan reliable. Oleh karena itu kuesionernya layak untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

1. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Partisipasi Anggaran (X1)

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas partisipasi anggaran yang ditunjukkan pada table IV.5 sebagai berikut:

Tabel IV.5
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PARTISIPASI ANGGARAN

Variabel	Validitas				Reliabilitas	
	Pearson Corelation	r Hitung	r Tabel	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.
Q1	0,539	0,444	0,294	Valid	0,779	Reliable
Q2	0,566	0,498	0,294			
Q3	0,664	0,534	0,294			
Q4	0,790	0,795	0,294			
Q5	0,733	0,570	0,294			
Q6	0,588	0,394	0,294			
Q7	0,621	0,432	0,294			
Q8	0,481	0,311	0,294			

Sumber : Data Olahan (2017)

Q1. Saya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses penyusunan rencana anggaran.

- Q2. Saya secara aktif terlibat dalam proses perencanaan “bottom up” sehingga memotivasi saya bekerja sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah (Pemda).
- Q3. Pendapat saya diterima ketika menetapkan perencanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Q4. Rencana anggaran tidak akan ditetapkan sampai saya merasa puas.
- Q5. Saya mengadakan pertemuan dengan staf saya untuk rencana anggaran.
- Q6. Staf saya memberikan kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyusunan rencana anggaran.
- Q7. Pendapat saya tidak dipertimbangkan dalam proses penyusunan anggaran.
- Q8. Karena kendala waktu, saya sering menetapkan anggaran yang tidak sesuai dengan Daftar Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam tabel IV.5 terlihat bahwa variabel partisipasi anggaran terdapat 8 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung 0,444 > nilai r tabel 0,294.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (partisipasi anggaran) yang nilai r hitung > r tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid.

Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai cronbach alpha adalah 0,793 yang berarti variabel partisipasi anggaran tersebut reliabel karena memiliki koefisien alpha di atas 0,60.

2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Kejelasan Tujuan Anggaran (X2)

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas kejelasan tujuan anggaran yang ditunjukkan pada table IV.6 sebagai berikut:

Tabel IV.6
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KEJELASAN TUJUAN
ANGGARAN

Variabel	Validitas			Reliabilitas		
	Pearson Corelation	r Hitung	r Tabel	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.
Q9	0,562	0,535	0,294	Valid	0,860	Reliable
Q10	0,760	0,517	0,294			
Q11	0,661	0,479	0,294			
Q12	0,585	0,485	0,294			

Sumber : Data Olahan (2017)

Q9. Saya mengerti tujuan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Q10. Saya menyadari bahwa tujuan RKA-SKPD merupakan hal yang penting dan perlu diprioritaskan.

Q11. Tujuan RKA-SKPD kadang-kadang tidak jelas dan membingungkan.

Q12. Saya memahami sepenuhnya tujuan RKA-SKPD.

Dalam tabel IV.6 terlihat bahwa variabel partisipasi anggaran terdapat 4 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung 0,535 > nilai r tabel 0,294. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (kejelasan tujuan anggaran) yang nilai r hitung > r tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai cronbach alpha adalah 0,860 yang berarti variabel kejelasan tujuan anggaran tersebut reliable karena memiliki koefisien alpha diatas 0,60.

3. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Umpan Balik Anggaran (X3)

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas Umpan Balik anggaran yang ditunjukkan pada table IV.7 sebagai berikut:

Tabel IV.7
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS UMPAN BALIK ANGGARAN

Variabel	Validitas			Reliabilitas		
	Pearson Corelation	r Hitung	r Tabel	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.
Q13	0,616	0,487	0,294	Valid	0,775	Reliable
Q14	0,697	0,582	0,294			
Q15	0,730	0,600	0,294			
Q16	0,674	0,478	0,294			
Q17	0,647	0,460	0,294			
Q18	0,505	0,296	0,294			
Q19	0,585	0,399	0,294			

Sumber : Data Olahan (2017)

Q13. Saya mendapatkan umpan balik yang memadai sehubungan dengan prestasi saya dalam mencapai tujuan anggaran.

Q14. Saya memperoleh umpan balik yang berguna selama proses penyusunan rencana anggaran.

Q15. Saya memperoleh umpan balik dan evaluasi tentang kerja saya pada akhir siklus/daur penyusunan rencana anggaran.

Q16. Saya tidak memperoleh umpan balik terhadap kinerja saya dalam pencapaian tujuan anggaran.

Q17. Umpan balik yang saya peroleh selama proses penyusunan rencana anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja saya.

Q18. Saya memperbaiki tingkah laku menurut umpan balik yang saya terima.

Q19. Umpan balik yang saya terima pada akhir siklus penyusunan rencana anggaran umumnya tidak dapat digunakan dalam praktek.

Dalam tabel IV.7 terlihat bahwa variabel partisipasi anggaran terdapat 7 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung 0,467 > nilai r tabel 0,294.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (umpan balik anggaran) yang nilai r hitung > r tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai Cronbach Alpha adalah 0,775 yang berarti variabel umpan balik anggaran tersebut reliabel karena memiliki koefisien alpha di atas 0,60.

4. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Evaluasi Anggaran (X4)

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas evaluasi anggaran yang ditunjukkan pada tabel IV.8 sebagai berikut:

Tabel IV.8
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS EVALUASI ANGGARAN

Variabel	Validitas				Reliabilitas	
	Pearson Correlation	r Hitung	r Tabel	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.
Q20	0,544	0,364	Valid	Valid	0,766	Reliable
Q21	0,844	0,679	0,294			
Q22	0,661	0,445	0,294			
Q23	0,568	0,325	0,294			
Q24	0,507	0,381	0,294			
Q25	0,570	0,354	0,294			
Q26	0,649	0,412	0,294			

Sumber : Data Olahan (2017)

Q20. Pimpinan menyebutkan RKA-SKPD ketika berbicara mengenai efisiensi dan efektivitas kepada saya sebagai kepala unit.

- Q21. Pimpinan saya menganggap bahwa saya sendiri yang bertanggung jawab atas penyimpangan anggaran dalam Unit saya.
- Q22. Pimpinan tidak puas dengan penjelasan saya atas penyimpangan anggaran dalam unit saya.
- Q23. Pimpinan membicarakan kepada saya mengenai peningkatan pekerjaan untuk memenuhi tujuan RKA-SKPD.
- Q24. Pimpinan akan menunjukkan ketidakpuasannya mengenai anggaran unit saya bila tidak tercapai.
- Q25. Penyimpangan anggaran yang besar dalam unit saya telah mendapat komentar dari pimpinan, karena mengakibatkan prestasi saya yang buruk..
- Q26. Saya telah menjelaskan kepada pimpinan mengenai item-item anggaran yang melampaui RKA-SKPD karena tidak dapat saya kendalikan.

Dalam tabel IV.8 terlihat bahwa variabel partisipasi anggaran terdapat 7 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung 0,364 > nilai r tabel 0,294.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (evaluasi anggaran) yang nilai r hitung > r tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid.

Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai cronbach alpha adalah 0,766 yang berarti variabel evaluasi anggaran tersebut reliabel karena memiliki koefisien alpha diatas 0,60.

5. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Kinerja Pejabat Pemda (Y)

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas kejelasan tujuan anggaran yang ditunjukkan pada table IV.9 sebagai berikut:

Tabel IV.9
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KINERJA PEJABAT PEMDA

Variabel	Validitas				Reliabilitas	
	Pearson Corelation	r Hitung	r Tabel	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.
Y1	0,509	0,325	0,294	Valid	0,766	Reliable
Y2	0,481	0,326	0,294			
Y3	0,495	0,368	0,294			
Y4	0,420	0,312	0,294			
Y5	0,675	0,634	0,294			
Y6	0,551	0,543	0,294			
Y7	0,480	0,300	0,294			
Y8	0,593	0,448	0,294	Valid	0,766	Reliable
Y9	0,678	0,598	0,294			
Y10	0,740	0,667	0,294			
Y11	0,762	0,696	0,294			
Y12	0,806	0,745	0,294			

Sumber : Hasil Data Olahan (2017)

- Y1. Target permulaan rencana anggaran selalu ditetapkan serendah mungkin.
- Y2. Biasanya target yang ditetapkan mudah dicapai.
- Y3. Saya selalu merevisi target anggaran yang ditetapkan setelah berjalan 6 bulan.
- Y4. Saya perlu mengetahui penyebab penyimpangan anggaran untuk kelompok maupun individu dalam unit saya.
- Y5. Saya harus kerja keras untuk mencapai target setelah direvisi.
- Y6. Atasan saya sering bersikap kritis terhadap penentuan target, karena ditetapkan terlalu rendah.
- Y7. Proyek-proyek di unit kerja saya mengikuti kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

- Y8. Kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat tidak dipertimbangkan pada saat merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek.
- Y9. Kinerja saya baik atau pada umumnya dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dicapai/dilaksanakan.
- Y10. Kinerja saya baik atau atau pada umumnya dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dikendalikan/diawasi.
- Y11. Kinerja saya baik atau pada umumnya dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dipertanggung jawabkan.
- Y12. Untuk mengetahui perkembangan kinerja saya baik atau pada umumnya baik jika rencana dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun dapat diperbandingkan.

Dalam tabel IV.9 terlihat bahwa variabel partisipasi anggaran terdapat 12 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung $0,325 >$ nilai r tabel $0,294$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel dependen (kinerja pejabat pemda) yang nilai r hitung $>$ r tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai cronbach alpha adalah $0,766$ yang berarti variabel kinerja pejabat pemda tersebut reliabel karena memiliki koefisien alpha diatas $0,60$.

D. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

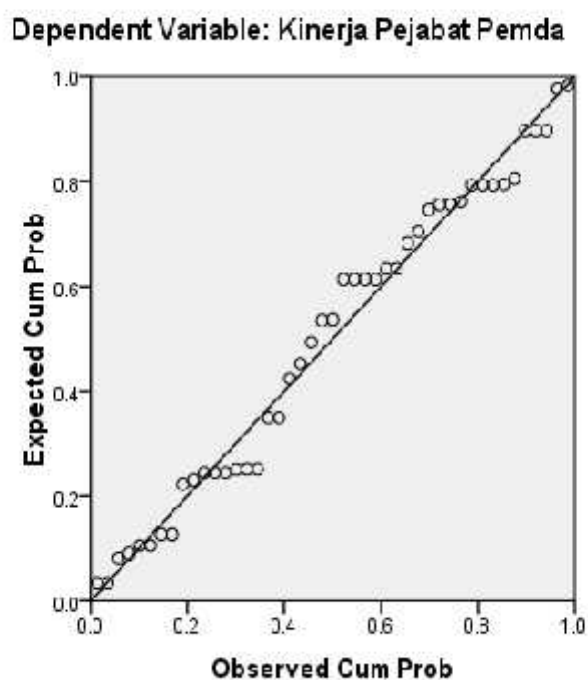
Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas maka akan terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini untuk

menguji normalitas menggunakan normal probability plot, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai $p > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel probability plot yang diteliti terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada gambar IV.1 dibawah ini :

Gambar IV.1

UJI NORMALITAS

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Data Olahan (2017)

Dari normal probability plot di atas dapat dilihat secara seksama bahwa data menyebar sekitar garis diagonal atau mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menguji nilai residual dengan Kolmogorov-Smirnov. Untuk menguji distribusi residual normal atau tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel IV.10 dibawah ini:

Tabal IV.10
HASIL UJI NORMALITAS (K-S TEST)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.33556794
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.768
Asymp. Sig. (2-tailed)		.597
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Data Olahan (2017)

Tabel IV. 10 menunjukkan Nilai K-S sebesar 0,768 (sig 0,597) untuk semua variabel tersebut diatas 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel partisipasi, tujuan, umpan balik, evaluasi dan kinerja pejabat pemda secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

2. Hasil Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin-Watson, terlihat pada tabel IV.11 dibawah ini:

Tabel IV.11
HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.876 ^a	.768	.745	.28644	1.799

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda

Sumber : Hasil Data Olahan (2017)

Pada tabel IV.11 terlihat bahwa angka Durbin-Watson sebesar 1,799 nilai akan di bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikan 5% jumlah simple (n) 45 dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka di tabel Durbin-Watson test bound akan di peroleh nilai sebagai berikut:

$$dL=1,3357$$

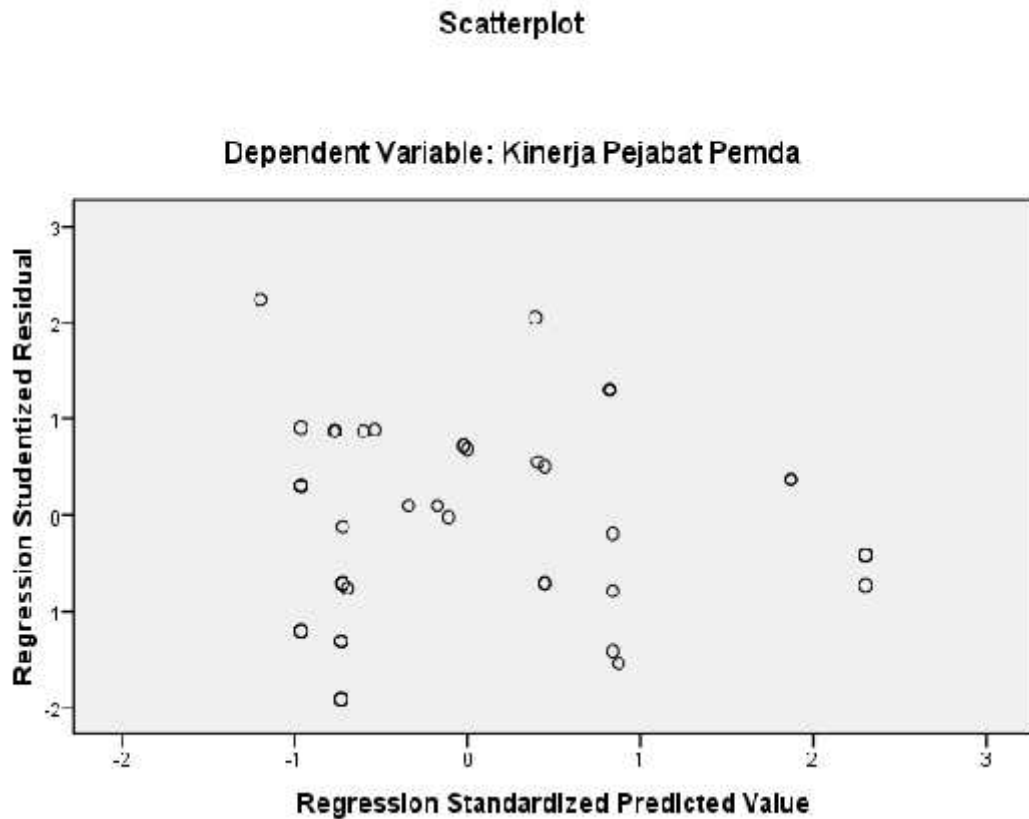
$$dU=1,7200$$

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa nilai Durbin-Watson 1,799 berada di antara dU dan (4 – dU) atau 1,799 lebih besar dari 1,72 dan 1,799 lebih kecil dari 2,28 maka dapat dikatakan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat Autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat melalui grafik scatterplot deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X dan Y menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Seperti terlihat pada gambar IV.2 dibawah ini:

Gambar IV.2
DIAGRAM SCATTERPLOT HETEROKEDASTISITAS



Sumber : Hasil Data Olahan (2017)

Pada gambar IV.2 jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y.

Maka dapat di simpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastitas atau H_0 di terima yang berarti modal regresi ini layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

Uji Heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Tabel dibawah ini memperlihatkan uji Heterokedastisitas.

Tabel IV.12
HASIL UJI GLEJSER
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.149	3.870		1.589	.120
Partisipasi Anggaran	-.158	.070	-.445	-2.266	.059
Kejelasan Tujuan Anggaran	-.189	.225	-.135	-.838	.407
Umpan Balik Anggaran	-.014	.079	-.037	-.173	.864
Evaluasi Anggaran	.196	.115	.427	1.712	.095

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Hasil Data Olahan 2017)

Data hasil uji glejser pada tabel IV.12 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi variabel independen. Hal ini terlihat bahwa nilai sig > alpa (5%) jadi dapat di simpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Tabel dibawah ini memperlihatkan uji multikolinearitas.

Tabel IV.13
UJI MULTIKOLINEARITAS
Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)			
Partisipasi Anggaran	.485	.566	1.767
Kejelasan Tujuan Anggaran	.486	.836	1.196
Umpan Balik Anggaran	.237	.463	2.160
Evaluasi Anggaran	-.032	.350	2.856

a. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda

Sumber : Hasil Data Olahan (2017)

Berdasarkan tabel IV.13 dapat di simpulkan bahwa nilai Tolerance semua variabel lebih besar 0,05(>5%) serta nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 (VIF>10). Maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

5. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregrasikan kinerja pejabat pemda sebagai variabel dependen dan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi berganda ini menggunakan program SPSS yang sudah tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.14
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	-25.113	7.650		-3.283	.002		
Partisipasi Anggaran	.649	.138	.485	4.709	.000	.566	1.767
Kejelasan Tujuan Anggaran	2.549	.445	.486	5.728	.000	.836	1.196
Umpan Balik Anggaran	.327	.157	.237	2.083	.044	.463	2.160
Evaluasi Anggaran	-.055	.227	-.032	-.242	.810	.350	2.856

a. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda

Sumber : Hasil Data Olahan (2017)

Dari hasil analisis data di atas, maka hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + 1X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4 + e$$

$$Y = -25.113 + 0,649X_1 + 2,549X_2 + 0,327X_3 - 0,055X_4 + e$$

1. Konstanta (a).

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat sebesar -25.113.

2. Partisipasi (X1) terhadap kinerja pejabat pemda (Y).

Nilai koefisien leverage untuk variabel X1 sebesar 0,649. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,649 %.

3. Kejelasan Tujuan Anggaran (X2) terhadap Kinerja Pejabat Pemda (Y).

Nilai koefisien leverage untuk variabel X2 sebesar 2,549. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 2,549 %.

4. Umpan Balik Anggaran (X3) terhadap Kinerja Pejabat Pemda (Y).

Nilai koefisien leverage untuk variabel X3 sebesar 0,327. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,327 %.

5. Evaluasi Anggaran (X4) terhadap Kinerja Pejabat Pemda (Y).

Nilai koefisien leverage untuk variabel X4 sebesar -0,055 dan bertanda negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar -0,055 %.

b. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini mengetahui dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu.

Sebaliknya jika signifikansi $\alpha > 0,05$ maka tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Berikut hasil uji regresi (uji t) dicantumkan dalam tabel IV.14 yang telah dibahas pada uji analisis regresi berganda:

1. Variabel partisipasi anggaran (X1) menunjukkan *Coefficients Beta* sebesar 0,484 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel partisipasi anggaran (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hipotesis H1 terbukti.
2. Variabel kejelasan tujuan anggaran (X2) menunjukkan *Coefficients Beta* sebesar 0,486 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel kejelasan tujuan anggaran (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hipotesis H2 terbukti.
3. Variabel umpan balik anggaran (X3) menunjukkan *Coefficients Beta* sebesar 0,237 pada tingkat signifikansi 0,044, karena tingkat signifikansi $0,044 < 0,05$. Hal ini berarti variabel umpan balik anggaran (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hipotesis H3 terbukti.

4. Variabel evaluasi anggaran (X4) menunjukkan *Coefficients Beta* sebesar -0,032 pada tingkat signifikansi 0,810, karena tingkat signifikansi $0,810 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh negative yang tidak signifikan terhadap kinerja pejabat pemerintah daerah (Y) artinya hipotesis H4 tidak terbukti terbukti.

c. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil temuan hipotesis H1 dan pembahasan

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi kinerja pejabat pemda dalam pembuatan tujuan anggaran akan meningkatkan kinerja pejabat pemda. Sebaliknya jika partisipasi kinerja pejabat pemda dalam pembuatan tujuan anggaran turun maka kinerja pejabat pemda juga akan turun. Oleh sebab itu hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima.

2. Hasil temuan hipotesis H2 dan pembahasan

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja pejabat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya jika tujuan anggaran kurang jelas maka

kinerja pejabat pemda juga akan turun. Oleh sebab itu hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima.

3. Hasil temuan hipotesis H3 dan pembahasan

Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel umpan balik anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima pejabat pemda maka semakin tinggi kinerja pejabat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya jika umpan balik anggaran yang sedikit maka akan melemahkan kinerja pejabat pemda. Oleh sebab itu hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima.

4. Hasil temuan hipotesis H4 dan pembahasan

Hasil temuan keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative yang tidak signifikan atas variabel evaluasi anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Artinya nilai evaluasi anggaran yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin rendah dan sebaliknya nilai evaluasi anggaran yang semakin rendah akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin tinggi.

Hal ini dikarenakan para penyusun anggaran di setiap dinas tidak bertanggung jawab atas anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya, hanya sebagian orang saja yang terlibat didalam menentukan dan menyusun anggaran. Oleh karena itu hipotesis H4 dalam penelitian ini ditolak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran) terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah pemda terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi kinerja pejabat pemda dalam pembuatan tujuan anggaran akan meningkatkan kinerja pejabat pemda. Sebaliknya jika partisipasi kinerja pejabat pemda dalam pembuatan tujuan anggaran turun maka kinerja pejabat pemda juga akan turun.
2. Kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah pemda terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja pejabat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya jika tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja pejabat pemda juga akan turun.
3. Umpan balik anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah pemda terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima pejabat pemda maka semakin tinggi kinerja pejabat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya jika

umpan balik anggaran yang sedikit maka akan melemahkan kinerja pejabat pemda.

4. Evaluasi anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemda terdapat pengaruh negative yang tidak signifikan. Artinya nilai evaluasi anggaran yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin rendah dan sebaliknya nilai evaluasi anggaran yang semakin rendah akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah hendaknya karakteristik tujuan anggaran untuk lebih ditingkatkan lagi mengenai peningkatan dalam partisipasi penyusunan anggaran.
2. Penelitian kedepan dapat menambah beberapa variabel yang mungkin, berpengaruh dalam melakukan penelitian tentang Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya sebaiknya menguji variabel-variabel lain untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa meningkatkan kinerja aparat di pemerintah daerah seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan komitmen organisasi
4. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar dari penelitian sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah' ayat 153)
- Al-Qur'an (Surah An-Insyrah ayat 6-8)
- Aulia Apriani, M. Rasuli & Taufeni Taufik. (2009). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel Intervening.*
- Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2011). *Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Blora Dengan Komitmen.*
- Bastian, Indra.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat Jakarta.*
- Hapsari, N. (2010). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Dan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pt Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Konstruksi I). Skripsi, 1–58.*
- Kamaliah, Darlis, E., & Virsanita, V. (2010). *Pengaruh Perilaku Oportunistik Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Provinsi Di Provinsi Riau). Jurnal Ekonomi, 18(2), 50–62.*
- Munawar. (2006). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang. Simposium Nasional Akuntansi Ugm Yogyakarta.*
- Putu, L., Wirawati, P., Sinarwati, N. K., & Atmadja, A. T. (2014). *Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2.*
- _____, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jakarta.*

- _____, Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa* Walikota Makassar, Makassar.
- _____, Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- _____, Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- _____, Permendagri No. 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Jakarta
- Rasuli, M., & Darlis, E. (2015). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin*, 10, 179–193.
- Rahayu, dkk. (2007). *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Jambi*.
- Solina, M. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kota Tanjung Pinang*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, Jakarta*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta*.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta*
- Veby Anggi Wulandari. (2008). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Pekanbaru*.

Lampiran : Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER

A. Daftar Pertanyaan Umum

Nama Responden :
Nama Pemerintahan : Kota Makassar
Nama Satuan Unit Kerja :
Nama Jabatan :
Pendidikan :
Masa kerja :
Umur :

KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN

Pertanyaan berikut berkaitan dengan karakteristik tujuan anggaran Satuan Kerja yang Bapak/Ibu Pimpim. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan. Mohon Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling tepat dengan menyilang atau melingkari nomor yang tersedia di bawah ini:

Keterangan:

- Sangat Setuju = 5
- Setuju = 4
- Ragu-ragu = 3
- Tidak setuju = 2
- Sangat tidak setuju = 1

B. Daftar Pertanyaan khusus

1. Partisipasi Anggaran

No	Uraian Pertanyaan Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Saya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap proses penyusunan rencana anggaran.					
2	Saya secara aktif terlibat dalam proses perencanaan “bottom up” sehingga memotivasi saya bekerja sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah (Pemda)					
3	Pendapat saya diterima ketika menetapkan perencanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah					
4	Rencana anggaran tidak akan ditetapkan sampai saya merasa puas.					
5	Saya mengadakan pertemuan dengan staf saya untuk rencana anggaran.					
6	Staf saya memberikan kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyusunan rencana anggaran.					
7	Pendapat saya tidak dipertimbangkan dalam proses penyusunan anggaran.					
8	Karena kendala waktu, saya sering menetapkan anggaran yang tidak sesuai dengan Daftar Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.					

2. Kejelasan Tujuan Anggaran

No	Uraian Pertanyaan Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Saya mengerti tujuan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).					
2	Saya menyadari bahwa tujuan RKA-SKPD merupakan hal yang penting dan perlu diprioritaskan.					

3	Tujuan RKA-SKPD kadang-kadang tidak jelas dan membingungkan.					
4	Saya memahami sepenuhnya tujuan RKA-SKPD.					

3. Umpan Balik Anggaran

No	Uraian Pertanyaan Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Saya mendapatkan umpan balik yang memadai sehubungan dengan prestasi saya dalam mencapai tujuan anggaran.					
2	Saya memperoleh umpan balik yang berguna selama proses penyusunan rencana anggaran.					
3	Saya memperoleh umpan balik dan evaluasi tentang kerja saya pada akhir siklus/daur penyusunan rencana anggaran.					
4	Saya tidak memperoleh umpan balik terhadap kinerja saya dalam pencapaian tujuan anggaran.					
5	Umpan balik yang saya peroleh selama proses penyusunan rencana anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja saya.					
6	Saya memperbaiki tingkah laku menurut umpan balik yang saya terima.					
7	Umpan balik yang saya terima pada akhir siklus penyusunan rencana anggaran umumnya tidak dapat digunakan dalam praktek					

4. Evaluasi Anggaran

No	Uraian Pertanyaan Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Pimpinan menyebutkan RKA-SKPD ketika berbicara mengenai efisiensi dan efektivitas kepada saya sebagai kepala unit.					
2	Pimpinan saya menganggap bahwa saya sendiri yang bertanggung jawab atas penyimpangan anggaran dalam Unit saya.					
3	Pimpinan tidak puas dengan penjelasan saya atas penyimpangan anggaran dalam unit saya.					
4	Pimpinan membicarakan kepada saya mengenai peningkatan pekerjaan untuk memenuhi tujuan RKA-SKPD.					
5	Pimpinan akan menunjukkan ketidakpuasannya mengenai anggaran unit saya bila tidak tercapai.					
6	Penyimpangan anggaran yang besar dalam unit saya telah mendapat komentar dari pimpinan, karena mengakibatkan prestasi saya yang buruk.					
7	Saya telah menjelaskan kepada pimpinan mengenai item-item anggaran yang melampaui RKA-SKPD karena tidak dapat saya kendalikan.					

ITEM PERNYATAAN MENGENAI KINERJA

Pernyataan berikut ini berkaitan dengan kinerja Bapak/Ibu sebagai pimpinan pembuat usulan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja dalam Unit Kerja yang Bapak/Ibu pimpin. Diharapkan pendapat Bapak/Ibu pimpin disesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak/Ibu pimpin dan berdasarkan pengalaman selama ini. Mohon Bapak/Ibu memilih jawaban dengan skala yang paling tepat dengan menyilang atau melingkari nomor yang tersedia di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan:

- Sangat Setuju = 5
- Setuju = 4
- Ragu-ragu = 3
- Tidak setuju = 2
- Sangat tidak setuju = 1

No	Uraian Pertanyaan Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Target permulaan rencana anggaran selalu ditetapkan serendah mungkin.					
2	Biasanya target yang ditetapkan mudah dicapai.					
3	Saya selalu merevisi target anggaran yang ditetapkan setelah berjalan 6 bulan.					
4	Saya perlu mengetahui penyebab penyimpangan anggaran untuk kelompok maupun individu dalam unit saya.					
5	Saya harus kerja keras untuk mencapai target setelah direvisi.					
6	Atasan saya sering bersikap kritis terhadap penentuan target, karena ditetapkan terlalu rendah.					

7	Proyek-proyek di unit kerja saya mengikuti kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat					
8	Kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat tidak dipertimbangkan pada saat merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek.					
9	Kinerja saya baik atau pada umumnya dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dicapai/dilaksanakan.					
10	Kinerja saya baik atau pada umumnya dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dikendalikan/diawasi.					
11	Kinerja saya baik atau pada umumnya dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dipertanggung jawabkan.					
12	Untuk mengetahui perkembangan kinerja saya baik atau pada umumnya baik jika rencana dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun dapat diperbandingkan.					

Komentar Bapak/Ibu terhadap kuesioner ini:

.....
.....

.....Terima kasih atas waktu dan bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan untuk mengisi kuesioner ini.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.33556794
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.768
Asymp. Sig. (2-tailed)		.597
a. Test distribution is Normal.		

Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.149	3.870		1.589	.120
Partisipasi Anggaran	-.158	.070	-.445	-2.266	.059
Kejelasan Tujuan Anggaran	-.189	.225	-.135	-.838	.407
Umpan Balik Anggaran	-.014	.079	-.037	-.173	.864
Evaluasi Anggaran	.196	.115	.427	1.712	.095

a. Dependent Variable:

RES2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.830	.851	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Partisipasi Anggaran	30.6222	5.08692	45
Kejelasan Tujuan Anggaran	18.0444	1.29607	45
Umpan Balik Anggaran	25.7333	4.93779	45
Evaluasi Anggaran	26.6000	3.93354	45
Kinerja Pejabat Pemda	47.7111	6.80114	45

Inter-Item Correlation Matrix

	Partisipasi Anggaran	Kejelasan Tujuan Anggaran	Umpan Balik Anggaran	Evaluasi Anggaran	Kinerja Pejabat Pemda
Partisipasi Anggaran	1.000	.168	.534	.645	.673
Kejelasan Tujuan Anggaran	.168	1.000	.307	.387	.628
Umpan Balik Anggaran	.534	.307	1.000	.727	.623
Evaluasi Anggaran	.645	.387	.727	1.000	.642
Kinerja Pejabat Pemda	.673	.628	.623	.642	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Partisipasi Anggaran	118.0889	211.174	.686	.636	.779
Kejelasan Tujuan Anggaran	130.6667	315.682	.460	.541	.860
Umpan Balik Anggaran	122.9778	213.295	.699	.582	.775
Evaluasi Anggaran	122.1111	230.692	.773	.650	.766
Kinerja Pejabat Pemda	101.0000	158.409	.782	.759	.766

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Pejabat Pemda	47.7111	6.80114	45
Partisipasi Anggaran	30.6222	5.08692	45
Kejelasan Tujuan Anggaran	18.0444	1.29607	45
Umpan Balik Anggaran	25.7333	4.93779	45
Evaluasi Anggaran	26.6000	3.93354	45

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.876 ^a	.768	.745	.28644	1.799

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1545.700	4	386.425	31.574	.000 ^a
	Residual	489.545	40	12.239		
	Total	2035.244	44			

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda

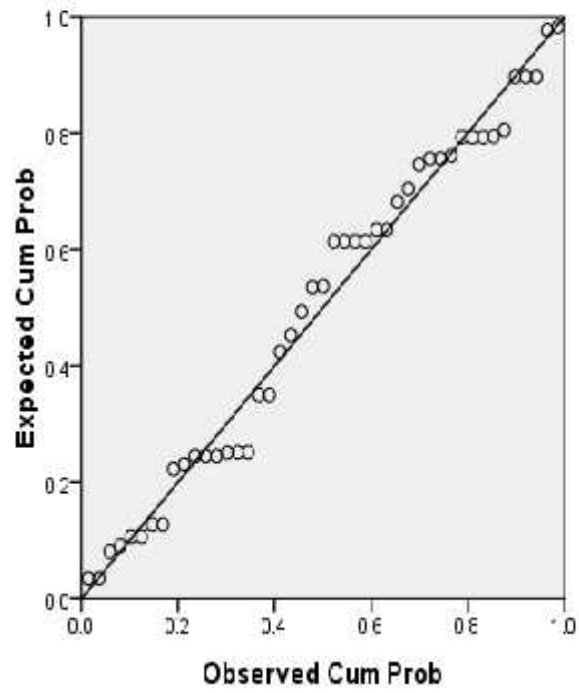
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-25.113	7.650		-3.283	.002		
	Partisipasi Anggaran	.649	.138	.485	4.709	.000	.566	1.767
	Kejelasan Tujuan Anggaran	2.549	.445	.486	5.728	.000	.836	1.196
	Umpan Balik Anggaran	.327	.157	.237	2.083	.044	.463	2.160
	Evaluasi Anggaran	-.055	.227	-.032	-.242	.810	.350	2.856

a. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda

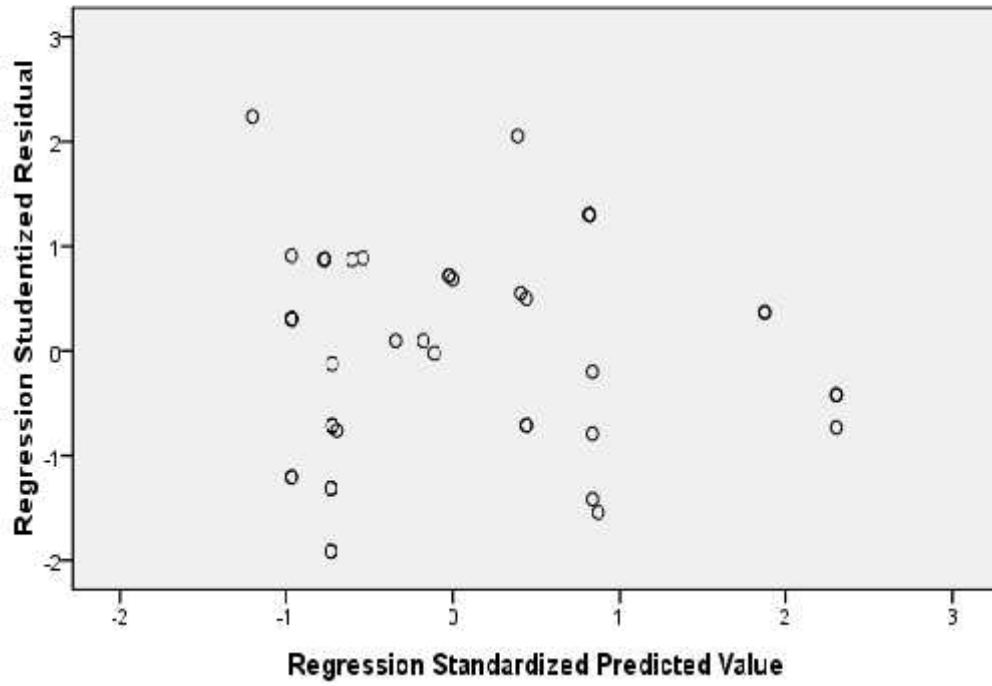
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda



Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pemda



Statistics

		Jenis Kelamin	Nama Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Umur
N	Valid	45	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0	0

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	26	57.8	57.8	57.8
	Perempuan	19	42.2	42.2	100.0
Total		45	100.0	100.0	

Nama Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala Dinas	8	17.8	17.8	17.8
	Kepala Bidang	35	77.8	77.8	95.6
	DPRD	2	4.4	4.4	100.0
Total		45	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	8	17.8	17.8	17.8
	S1	26	57.8	57.8	75.6
	S2	7	15.6	15.6	91.1
	S3	4	8.9	8.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5 - 10 Tahun	2	4.4	4.4	4.4
	11 - 15 Tahun	10	22.2	22.2	26.7
	16 - 20 Tahun	21	46.7	46.7	73.3
	21 - 25 Tahun	7	15.6	15.6	88.9
	Diatas 25 Tahun	5	11.1	11.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26 - 30 Tahun	9	20.0	20.0	20.0
	31 - 35 Tahun	17	37.8	37.8	57.8
	36 - 40 Tahun	13	28.9	28.9	86.7
	Diatas 40 Tahun	6	13.3	13.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Statistics

		Partisipasi Anggaran	Kejelasan Tujuan Anggaran	Umpan Balik Anggaran	Evaluasi Anggaran	Kinerja Pejabat Pemda
N	Valid	45	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		30.6222	18.0444	25.7333	26.6000	47.7111
Median		32.0000	18.0000	25.0000	26.0000	47.0000
Std. Deviation		5.08692	1.29607	4.93779	3.93354	6.80114
Minimum		23.00	16.00	19.00	19.00	37.00
Maximum		40.00	20.00	35.00	35.00	60.00

Partisipasi Anggaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	5	11.1	11.1	11.1
	25	5	11.1	11.1	22.2
	27	8	17.8	17.8	40.0
	32	16	35.6	35.6	75.6
	35	6	13.3	13.3	88.9
	40	5	11.1	11.1	100.0
Total		45	100.0	100.0	

Kejelasan Tujuan Anggaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16	7	15.6	15.6	15.6
	17	9	20.0	20.0	35.6
	18	10	22.2	22.2	57.8
	19	13	28.9	28.9	86.7
	20	6	13.3	13.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Umpan Balik Anggaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	5	11.1	11.1	11.1
	21	7	15.6	15.6	26.7
	23	5	11.1	11.1	37.8
	24	5	11.1	11.1	48.9
	25	6	13.3	13.3	62.2
	28	4	8.9	8.9	71.1
	30	4	8.9	8.9	80.0
	31	4	8.9	8.9	88.9
	35	5	11.1	11.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Evaluasi Anggaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	2	4.4	4.4	4.4
	23	5	11.1	11.1	15.6
	24	12	26.7	26.7	42.2
	26	7	15.6	15.6	57.8
	27	1	2.2	2.2	60.0
	28	9	20.0	20.0	80.0
	30	4	8.9	8.9	88.9
	35	5	11.1	11.1	100.0
Total		45	100.0	100.0	

Kinerja Pejabat Pemda

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	37	2	4.4	4.4	4.4
	38	2	4.4	4.4	8.9
	39	2	4.4	4.4	13.3
	41	4	8.9	8.9	22.2
	43	5	11.1	11.1	33.3
	45	1	2.2	2.2	35.6
	46	4	8.9	8.9	44.4
	47	4	8.9	8.9	53.3
	48	5	11.1	11.1	64.4
	50	4	8.9	8.9	73.3
	52	3	6.7	6.7	80.0
	57	4	8.9	8.9	88.9
	59	1	2.2	2.2	91.1
	60	4	8.9	8.9	100.0
Total		45	100.0	100.0	